



**ANALISIS PERBEDAAN ERA REFORMASI PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YIDHOYONO
DENGAN PRESIDEN JOKO WIDODO**
(ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE REFORM ERA DURING THE
GOVERNMENT OF PRESIDENT SUSILO BAMBANG YIDHOYONO AND PRESIDENT
JOKO WIDODO)

Irwan Triadi, Kevin Angelo Pangaribuan, Imagrace Triamorita Tampubolon,
Aldhy Wicaksana Naibaho

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail : irwantriadi1@yahoo.com, 2310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611279@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract (English)

presidential system is a republican system of government where executive power is elected through elections and is separate from legislative power. In this system of government, the head of state is the president. This journal will discuss the differences between the reigns of President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo in carrying out their duties while leading the State of Indonesia. To find out the results of this research, this journal uses a normative juridical approach and literature study. According to Soerjono Soekanto, the normative juridical approach is legal research that examines library materials and secondary data as a basis for research by prioritizing searching for regulations and literature related to the problem being researched. The data collection technique used in this research is library research. Literature study is a way of searching for data by reviewing books, searching literature, notes and reports that are in line with research. This literature study process is also used to collect data. Later the author includes this data in the research results. This research aims to provide information to readers regarding the differences in methods or programs during the 6th President's leadership period and the 7th President's leadership period.

Article History

Submitted: 17 May 2024

Accepted: 26 May 2024

Published: 27 May 2024

Key Words

*Government System,
Differences in Government,
President*

Abstrak (Indonesia)

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial atau yang sering disebut juga sistem kepresidenan. Sistem presidensial atau sistem kepresidenan merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Pada sistem pemerintahan ini, kepala negara merupakan presiden. Jurnal ini akan membahas mengenai perbedaan masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya selama memimpin Negara Indonesia. Untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut, jurnal ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dan studi kepustakaan. ¹Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengutamakan

Sejarah Artikel

Submitted: 17 May 2024

Accepted: 26 May 2024

Published: 27 May 2024

Kata Kunci

*Sistem Pemerintahan,
Perbedaan
Pemerintahan, Presiden*

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14





penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan cara mencari data dengan menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang sejalan dengan penelitian. Proses studi pustaka ini dipergunakan juga untuk mengumpulkan data. Nantinya penulis mencantumkan data tersebut dalam hasil penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai perbedaan cara ataupun program masa kepemimpinan Presiden ke - 6 dengan masa kepemimpinan Presiden ke-7.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konstitusi suatu negara adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara, oleh karena itu, stabilitas konstitusi harus dijaga agar lebih kuat daripada hukum-hukum lainnya. Terutama jika nilai dan prinsip dalam menjalankan pemerintahan juga tertuang dalam konstitusi, maka perubahan konstitusi dapat berdampak sangat luas kepada sistem pengadaan atau penyelenggaraan negara. Negara yang demokratis berubah menjadi ditaktor karena adaperubahan dalam peraturan atau undang-undangnya . Semenjak resmi merdeka Negara Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan era. Diawali oleh Presiden Soekarno yang merupakan orde lama, kemudian berganti menjadi Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dan berganti lagi menjadi Era Reformasi semenjak kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Jimly Assidique mengatakan bahaw ada enam tahap konstistusi di Indonesia. Tahap pertama adalah dimulai tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Tahap kedua adalah dimulai pada 27 Desember 1949 selesai pada 17 Agustus 1950. Tahap ketiga dimulai pada 17 Agustus 1950 selesai pada 5 Juli 1959. Tahap keempat dimulai pada 5 Juli 1959 selesai pada 19 Oktober 1999. Tahap kelima dimulai pada 19 Oktober 1999 selesai pada 10 Agustus 2002. Dan tahap terakhir dimulai pada 10 Agustus 2002 hingga saat ini. Pada tahap pertama, berlaku UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada tahap keempat, UUD 1945 berlaku kembali beserta penjelasannya. Setelah itu, UUD 1945 mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai 2002. Naskah yang berlaku mulai pada 5 Juli 1959 digunakan untuk dasar melakukan perubahan di luar teks, yang kemudian menjadi lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari naskah UUD 1945.² Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan diatas, terbukti bahwa perubahan sistem pemerintahan sangat berpengaruh di Indonesia.

Berdasarkan sejarah, Indonesia adalah presidensial dalam sistem pemerintahan, berarti bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan di pusat maupun daerah, lembaga legislatif bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan. Perundang-undangan telah mengatur tugas, wewenang, hak, dan kewajiban pemerintah dan lembaga legislatif. Pemerintahan daerah dikelola oleh lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD). DPRD juga bertanggung jawab atas legislatif, anggaran, dan pengawasan. Negara mana pun pasti memiliki budaya politik dan ciri politiknya sendiri, yang diterjemahkan ke dalam sistem demokrasi negara tersebut. M.Hatta menyatakan bahwa demokrasi pancasila merupakan dasar dari kekeluargaan dan gotong-royong yang memiliki tujuan kesejahteraan rakyat. Demokrasi ini mengandung faktor religius,

² Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9(1).





kebenaran, cinta, dan budi pekerti luhur, pribadi Indonesia, dan keberlangsungan. Menurut Koentjoro Poerbopranoto, sistem pemerintahan demokrasi memfasilitasi partisipasi publik.³

Aktif dalam pemerintahan negara. Dalam bukunya yang berjudul *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Harris Soche menjelaskan demokrasi ialah pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintah tidak terpisahkan dari rakyat dan merupakan hak bagi rakyat bisa mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri mereka sendiri atas segala bentuk penindasan juga kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain atau badan yang bertugas memerintah. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang telah mengalami perkembangan seiring waktu. Dalam penelitiannya, Dwi Sulisworo dan kelompoknya memecah demokrasi Indonesia menjadi 4 era yang berbeda. Pertama adalah masa Konstitusional yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1950. Pada masa ini, parlemen dan partai sangat penting dan menonjol. Kedua adalah masa Terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden dan berakhir dengan peristiwa G30S pada tanggal 30 September 1965. Ketiga adalah masa Pancasila yang dimulai pada tahun 1965 hingga 1998. Pada saat ini, demokrasi konstitusional menjadi landasan utama yang menonjolkan sistem presidensial. Masa keempat adalah masa demokrasi pasca reformasi yang dimulai pada tahun 1998 hingga saat ini. Pada masa ini, terjadi banyak perubahan dalam sistem politik Indonesia. Banyak partai politik baru bermunculan dan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan rutin. Masa ini menandai perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam demokrasi Indonesia.

Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan Indonesia merupakan kekuasaan. Dimana hal tersebut sangat menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ada 3 jenis kekuasaan yang disebut "*Trias Politica*" ide atau konsep *Trias Politica* jelaskan oleh John Locke, yaitu filsuf Inggris. Lalu, *Trias Politica* di sebarluaskan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*". Untuk membuat perundang-undangan, kuasa legislatif bertanggung jawab. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan perundang-undangan. Kekuasaan yudikatif bertanggung jawab untuk mengadili pelanggaran perundang-undangan.

⁴Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan memaparkan mengenai perbedaan fokus masa pemerintahan antara kedua presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pencarian data penelitian ini menggunakan pendekatan literatur yang diambil dari berita dan artikel yang sudah tersebar di media *online* yang sejalan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori sistem pemerintahan dan teori demokrasi. Dalam menganalisis data dari berita ataupun artikel penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Untuk mengatur dan menjalankan operasi pemerintahan, setiap negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Sistem ini terdiri dari serangkaian Prinsip dasar terkait dengan pola kepemimpinan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan jenis lainnya yang berperan dalam menjaga stabilitas pemerintahan di sektor politik, ekonomi, dan pertahanan.

³ Soeprapto, Sri. "Konsep Muhammad Hatta tentang implementasi pancasila dalam perspektif etika pancasila." *Jurnal Filsafat* 23.2 (2013): 99-116

⁴ Ruhenda R, Haldi H, Mustapa H, Septiadi MA. Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*. 2020 Dec 8;1(2):58-69.





Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan program pembangunan dan keberhasilan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo?
2. Bagaimana efektivitas program pembangunan yang diluncurkan oleh masing-masing Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia?
3. Bagaimana evaluasi terhadap keberlanjutan program pembangunan tersebut dari masa ke masa, termasuk dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis serta studi kepustakaan. Sesuai dengan penjelasan Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan jenis penelitian di bidang hukum yang diterapkan dengan cara mengkaji ulang bacaan pustaka atau data lainnya sebagai landasan untuk meneliti dengan melakukan pencarian terhadap peraturan, undang-undang dan bahan pustaka yang relevan dengan topik ataupun permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam menyelesaikan penelitian ini adalah studi pustaka ataupun. Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dari banyak bacaan seperti dengan cara menelaah buku, pencarian bahan bacaan, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. Proses studi pustaka ini dipakai untuk mengumpulkan data dalam meneliti hal-hal seperti permasalahan yang ada dalam penelitian ini, setelah mendapat data, penulis akan mencantumkan data tersebut dalam hasil penelitian.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Program Pembangunan dan Keberhasilan yang terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Setelah berhasil memenangkan pemilu tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai membentuk program untuk kemajuan Indonesia yang ia fokuskan melalui beberapa program pilihan. "Hari ini saya tetapkan agar seratus hari pertama kita bisa menetapkan kegiatan penting, agar seratus hari pertama kita mencapai banyak hal. Dengan begitu, lima tahun mendatang hasilnya lebih tinggi," ucap SBY sesaat setelah beliau selesai dari rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden.

SBY mengeluarkan gerakan pembersihan mafia hukum yang menjadi penyakit yang tidak kunjung selesai dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk memberishan habis para mafia hukum tersebut, beliau membentuk Satuan Tugas. Dalam meningkatkan ketahanan pangan, SBY melakukan beberapa upaya seperti agar kebijakan umum tentang ketahanan pangan dijalankan sungguh-sungguh di seluruh industri terpadu dengan melibatkan sistem di daerah. Kedua, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) harus berkoordinasi dengan pimpinan daerah dengan sasaran peningkatan produksi pangan, sehingga dapat mendekati keswasembadaan pangan. Ketiga, revitalisasi DKP di setiap daerah provinsi dan kabupaten yang sudah terbentuk. Dalam program pendidikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tekadnya dalam meningkatkan dan menyamakan standar pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut terlihat

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14





dari peningkatan alokasi dana untuk sektor pendidikan serta penyusunan kebijakan yang mendukung. Dampaknya, angka partisipasi dalam pendidikan dan kualitas pengajaran di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Pembangunan pendidikan di era SBY ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan bebas, pendidikan awal anak, penambahan dan pemerataan Wajib Belajar Sekolah Dasar Selama 9 Tahun, dan peningkatan mutu dan hubungan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Program jaminan kesehatan yang difokuskan pada warga kurang mampu telah sukses mencapai golongan masyarakat paling terpinggirkan. Keberhasilan ini merupakan tonggak sejarah terbesar dalam bidang jaminan kesehatan sejak Indonesia merdeka. Pemerintah sangat memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk untuk rumah sakit pemerintah, swasta, dan puskesmas.

Strategi pembangunan fisik, infrastruktur, dan sumber daya manusia berkesinambungan dalam pemerintahan era. Pertumbuhan ekonomi berkeadilan, atau pertumbuhan berkelanjutan dengan keadilan, adalah konsep yang dijalankan oleh SBY. Pada prosesnya, pembangunan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dengan fokus pada Prioritas Pembangunan Nasional. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan disebut pertumbuhan dengan pemerataan. Untuk itu, program seperti Program Keluarga Harapan atau Keluarga Berencana, BLT, Jamkesmas, BOS, dan Kredit Usaha Kecil harus mendukung kedua hal tersebut.

Ketika ekonomi Indonesia berkembang, permintaan listrik meningkat. Karena situasi ini, pemerintah telah mendorong pembangunan pembangkit listrik sejak tahun 2009. Presiden SBY mengeluarkan Perpres No. 71/2006, yang merupakan perubahan dari Perpres No. 59, yang merupakan program untuk mempercepat tahap I program pembangkit listrik tenaga menggunakan batu bara 10.000 MW. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pembangkit yang sudah beroperasi dari program tersebut telah memasok listrik secara komersial sebesar 6.377 MW. Namun, itu jelas belum cukup; Perpres No. 4/2010 dan Perpres No. 48/2011 mengatur program percepatan pembangunan PLTU tahap II yang melibatkan lebih banyak pihak swasta. Dengan demikian, hingga Maret 2014, total daya yang dihasilkan oleh negara mencapai sekitar 49.630 MW. Kapasitas listrik total sebesar 72%, atau sekitar 36.000 MW, dikelola oleh PLN. Independent Power Producer (IPP) menyumbang 21%, Private Power Utility (PPU) menyumbang 4%, dan Izin Operasi (IO) non-BBM menyumbang 3%. Dari semua sumber daya listrik Indonesia, setengahnya masih bergantung pada batu bara, 23% menggunakan gas bumi, dan sisa 12,5 persen berasal dari bahan bakar minyak (BBM), energi air, panas bumi, dan sumber daya lain. Kapasitas listrik nasional akan ditingkatkan oleh setidaknya sembilan pembangkit listrik tambahan bahkan selama sisa masa pemerintahan SBY.

Berbeda dengan presiden ketujuh, Presiden Joko Widodo. Beliau mempunyai janji untuk masyarakat, dan hampir semuanya menjadi kenyataan. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi telah memulai pembangunan Ibu Kota Baru untuk Indonesia di Kalimantan Timur pada tahun 2022 dan diharapkan rampung pada tahun 2045. Dana untuk pembangunan Ibu Kota baru diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Proyek pembangunan Ibu Kota Baru adalah salah satu proyek prioritas strategis yang tertulis dalam RPJMN 2020-2024. Badan Pemerintah yakin proyek ini akan membantu dengan sangat baik pertumbuhan ekonomi, terutama di bagian timur Indonesia. Pembangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah dimulai dan direncanakan selesai pada tahun 2024. Perusahaan PT KCIC merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia yaitu BUMN dan perusahaan kereta api Negara China. Proyek yang sedang dibangun ialah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), pembangunan kereta cepat dimulai pada tahun





2016 dengan target selesai pada tahun 2018. Pada Tahun 2016-2018 pembangunan kereta cepat ini mengalami beberapa kendala yang membuatnya terhenti sementara. Akhirnya, KCB diresmikan dengan memberi nama kreta cepat tersebut WHOOSH (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat) dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2023. Kereta Cepat ini mempunyai 4 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi transportasi di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.

Sepertinya kereta cepat ini akan diperpanjang hingga Surabaya oleh pemerintah. Pada Februari 2022, Jokowi meresmikan fase kedua pembangunan MRT Jakarta. Fase kedua MRT Jakarta membentang dari wilayah Bundaran HI sampai dengan wilayah Ancol Barat. Fase 2A dan Fase 2B adalah nama dua tahap fase 2. Fase 2A memiliki tujuh stasiun bawah tanah dengan panjang total sekitar 5,8 kilometer, termasuk Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota. Fase 2B, sebaliknya, terdiri dari stasiun atas di Ancol Barat dan stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol).

Tahap studi kelayakan Fase 2B sedang berlangsung. Pada tanggal 28 Agustus 2023, Jokowi meresmikan proyek Light Rail Transit (LRT). Proyek ini telah dibangun sejak tahun 2015 untuk menyambungkan Jakarta, Bekasi, dan Depok. LRT sempat menuai perdebatan karena kesalahan konstruksi pada jembatan lengkung yang membuat LRT melambat. Selanjutnya, tinggi pintu masuknya hanya 1,6 meter. LRT sedang meningkatkan pembangunan yang dimulai dari Kelapa Gading sampai dengan ke Manggarai. Presiden Jokowi mendukung pembangunan perpanjangan rute LRT hingga Bogor. Jokowi telah membangun banyak bandara di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, adalah salah satu bandara yang pertama kali dibuka pada Juli 2023. Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dibangun bandara kawasan prioritas, yaitu Bandara Sibisa di Wakatobi dan Bandara Pitu di Morotai. Rute Cigombong-Cibadak dari Tol Ciawi-Sukabumi diresmikan oleh Jokowi pada 4 Agustus 2023. Sepanjang 11,9 km, jalan raya ini dibangun dengan dana fantastis yaitu Rp3,2 triliun. Dan Jokowi melakukan pembangunan Jalan Tol untuk Gedebage sampai dengan Cilacap, yang bicarakan akan menjadi jalan raya terpanjang di Indonesia.

Selanjutnya, pengangguran di Indonesia banyak berkurang. Antara tahun 2014 dan 2017, kabinet pemerintah dan buruh Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mempekerjakan 10 juta. Fakta sejalan dengan janji manis pemerintahan kepada masyarakat untuk mempekerjakan 10 juta tenaga kerja selama lima tahun (mulai Q4 2014). Artinya, selama empat tahun terakhir, sekitar 2 juta tenaga kerja terserap setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah selalu memberikan prioritas tinggi pada tenaga kerja Indonesia. seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2014, pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap 2 juta orang. Jumlah ini meningkat terus pada tahun 2015. Dan terus meningkat meningkat pada tahun 2017. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan karyawan, Kementerian Tenaga Kerja menangani mereka. di seluruh negeri. Sementara itu, pemerintah akan terus mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan dunia usaha. Dengan meningkatkan upah setiap tahun dan mengurangi biaya untuk pendidikan, transportasi, perumahan, dan pelayanan sosial, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja. Keselamatan karyawan mempermudah pekerjaan dan mengurangi biaya karyawan.



Efektivitas Program Pembangunan yang Diluncurkan oleh Masing-Masing Presiden dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) memiliki pendekatan yang berbeda dalam program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur di Indonesia. Pada masa kepemimpinan SBY (2004-2014), program-program seperti ⁶PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sangat berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan. Program ini berhasil menciptakan banyak proyek infrastruktur skala kecil yang langsung dikelola oleh masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, efektivitas PNPM Mandiri sering terkendala oleh masalah birokrasi dan korupsi, yang mengurangi dampak maksimal dari program ini.

⁷Sementara itu, Presiden Joko Widodo, yang mulai menjabat sejak 2014, mengarahkan fokus pembangunan pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Program seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) telah memperlihatkan dampak signifikan dalam menghubungkan berbagai daerah di Indonesia, sehingga memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi teritorial. Jokowi juga memperkenalkan kebijakan Dana Desa yang memberikan alokasi anggaran langsung ke desa-desa untuk pembangunan infrastruktur lokal, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan. Meski begitu, program ini juga menghadapi tantangan, seperti pengawasan yang kurang ketat yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana.

⁸Secara keseluruhan, baik Presiden SBY maupun Jokowi telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur di Indonesia melalui pendekatan yang berbeda. ⁹Program Presiden SBY yang berbasis pemberdayaan masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam jangka pendek dan langsung terasa di tingkat lokal, sementara program Jokowi yang berfokus pada infrastruktur besar menunjukkan dampak jangka panjang yang lebih luas dalam perekonomian nasional. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi bersama-sama mereka memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Evaluasi terhadap keberlanjutan program pembangunan tersebut dari masa ke masa, termasuk dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat berperan dalam memimpin departemen pertambangan dan energi serta membawa Indonesia melalui masa transisi politik. Pertama, SBY memimpin dalam sektor pertambangan dan energi dengan efektif, membawa negara melalui tantangan global seperti krisis BBM dan perundingan OPEC. Kedua, visi SBY untuk "Indonesia Baru" mencakup nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan kemajuan ekonomi, yang dapat membentuk dasar untuk masa depan yang lebih baik. Ketiga, kepemimpinan tegas dan pemikiran yang matang dari SBY menjadi modal penting dalam mengatasi tantangan

⁶ Bappenas. (2014). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁷ Setijadi, C. (2019). The Infrastructure of Development: Jokowi's National and International Infrastructure Agenda. ISEAS Perspective, 2019(51).

⁸ Laporan Tahunan Dana Desa 2020. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

⁹ World Bank. (2021). Indonesia Economic Prospects: Towards a Secure and Fast Recovery. World Bank Group.





politik dan ekonomi di masa depan serta mewujudkan stabilitas dan kemakmuran bagi Indonesia.

Melalui kepemimpinannya di sektor pertambangan dan energi, SBY dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan dan infrastruktur yang memperkuat kemandirian energi Indonesia. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diambil oleh SBY selama masa jabatannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang Indonesia. Ini termasuk kebijakan terkait dengan harga minyak dan energi, investasi asing, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak lainnya dapat dilihat dari visi SBY tentang "Indonesia Baru" yang mencakup nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi dapat membentuk fondasi untuk penguatan sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif di masa depan. Melalui kebijakan ekonomi yang tepat, SBY dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. SBY dapat mendorong reformasi lebih lanjut dalam sistem hukum dan politik Indonesia, termasuk perlindungan HAM, pemberantasan atau penyelesaian korupsi, dan penegakan hukum yang baik.

Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo memang mengalami akselerasi yang signifikan, terutama dalam pembangunan jalan tol, bandara, LRT, dan proyek kereta cepat. Meskipun hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menyebabkan dampak negatif seperti pengurangan lahan pertanian, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Terlebih lagi, beberapa proyek infrastruktur dibiayai oleh utang dari negara-negara asing, meningkatkan ketergantungan Indonesia pada mereka. Ini menimbulkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan, menghadirkan tantangan kompleks dalam pembangunan negara.

Pembangunan infrastruktur dapat memiliki dampak sosial yang signifikan terutama terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, proyek-proyek infrastruktur yang besar juga membutuhkan investasi yang besar dari pemerintah, yang dapat mengakibatkan peningkatan utang negara jika tidak dikelola dengan baik.

KESIMPULAN

SBY telah memulai banyak proyek infrastruktur penting yang telah membangun dasar untuk pertumbuhan ekonomi. Fokus utamanya adalah pada stabilitas makroekonomi dan kerjasama dengan sektor swasta melalui skema PPP. SBY juga memiliki pendekatan yang lebih konservatif dalam hal fiskal, dengan berusaha menjaga agar defisit anggaran tetap terkendali.

Di sisi lain, Jokowi mengambil pendekatan yang lebih agresif dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing Indonesia. Dia tidak ragu untuk meningkatkan belanja negara dan menggunakan pembiayaan luar negeri untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur tersebut. Pendekatan ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat, meskipun menghadapi tantangan dalam manajemen utang dan defisit anggaran.

Kedua presiden telah berperan penting dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Di bawah kepemimpinan SBY, peningkatan infrastruktur dasar telah menghasilkan stabilisasi ekonomi serta membuka jalan baru untuk menghubungkan berbagai wilayah. Sedangkan di era Jokowi, peningkatan konektivitas antar daerah dan pembangunan infrastruktur modern seperti





MRT dan LRT telah membantu menekan biaya logistik, mempercepat perjalanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Baik SBY maupun Jokowi telah berkontribusi secara signifikan pada pembangunan infrastruktur Indonesia. SBY membangun fondasi yang kuat dengan menekankan stabilitas dan kolaborasi swasta, sementara Jokowi melanjutkan dan memperluas pembangunan dengan cara yang lebih berani dan bersemangat. Kedua pihak menyadari bahwa infrastruktur sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Suetha, Dwi, Anny Wahyuni, and Budi Purnomo. "Menganalisis Perjuangan SBY Dalam Merawat Demokrasi Indonesia: Indonesia." *Jurnal EduSosial* 1.1 (2021):.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta,
- Bappenas. (2014). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Laporan Tahunan Dana Desa 2020. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Ruhenda R, Heldi H, Mustapa H, Septiadi MA. Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*. 2020 Dec 8;1(2)
- Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9(1).
- Soeprapto, Sri. "Konsep Muhammad Hatta tentang implementasi pancasila dalam perspektif etika pancasila." *Jurnal Filsafat* 23.2 (2013):
- Setijadi, C. (2019). The Infrastructure of Development: Jokowi's National and International Infrastructure Agenda. *ISEAS Perspective*, 2019(51).
- World Bank. (2021). Indonesia Economic Prospects: Towards a Secure and Fast Recovery. World Bank Group.